NEGARA KESATRUAN REPUBLIK INDONESIA

Disusun Oleh :

Kelompok 1

1. Achmad Hamdani Hilman (06)
2. Dhefano Seandy Nalendra (24
3. Fadhil Nawwaf Abrar (30)
4. Fairuz Fuadi Rafif (33)

TUGAS AKHIR BAB 2 PENDIDIKAN PANCASILA

SMK NEGERI 1 SURABAYA

# KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan makalah ini dengan judul  *“NKRI”.* Makalah ini disusun sebagai salah satu tugas mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan bertujuan untuk memperdalam pemahaman siswa terhadap pentingnya menjaga keutuhan NKRI dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Indonesia merupakan negara besar yang terdiri atas ribuan pulau, ratusan suku bangsa, bahasa daerah, serta beragam kepercayaan dan budaya. Dalam kondisi yang sangat majemuk ini, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa menjadi sebuah tantangan sekaligus kewajiban bagi setiap warga negara. Oleh karena itu, melalui makalah ini penulis mencoba mengulas beberapa aspek penting yang berkaitan dengan NKRI, antara lain unsur-unsur pembentukan NKRI yang menjadi fondasi utama berdirinya negara ini, peran strategis lembaga-lembaga negara dalam menjaga keutuhan NKRI, makna dan relevansi semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang beragam, serta pentingnya kemampuan menilai dan menyaring informasi atau berita yang dapat memecah belah persatuan bangsa, khususnya di era digital dan media sosial saat ini.

Makalah ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang bagaimana setiap elemen bangsa, termasuk generasi muda, dapat turut berkontribusi dalam menjaga dan memperkuat NKRI. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan makalah ini tentu masih terdapat kekurangan, baik dari segi isi, bahasa, maupun penyajian. Oleh karena itu, penulis membuka diri terhadap kritik dan saran yang membangun sebagai bahan evaluasi dan perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, motivasi, serta informasi yang berguna dalam penyusunan makalah ini. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, menambah wawasan kebangsaan, serta memperkuat rasa cinta tanah air di kalangan pelajar dan generasi penerus bangsa.

# BAB 1

BAB 1

## Unsur-unsur pembentukan NKRI

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah bentuk negara kesatuan dengan sistem pemerintahan republik yang dipilih oleh bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan kemerdekaan, kedaulatan, dan kesejahteraan rakyat. NKRI juga berarti negara yang wilayahnya terdiri dari berbagai pulau dan kepulauan dengan kekayaan alam, etnis, budaya, agama, dan bahasa yang beragam.

### Sejarah

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 menandai awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). NKRI merupakan negara yang terdiri dari wilayah kepulauan yang tersebar, dengan beraneka ragam adat, budaya, suku, dan keyakinan. Istilah NKRI merujuk pada Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.

Nilai-nilai persatuan dan kesatuan menjadi jiwa yang melahirkan NKRI, karena dalam persatuan, setiap individu akan menyadari dan menghargai keragaman yang ada di bangsa Indonesia. Nilai-nilai ini juga tercermin dengan jelas dalam dasar negara Pancasila dan konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pilihan Indonesia untuk menjadi negara kesatuan tidak hanya didasarkan pada kepentingan politik, tetapi juga pada komitmen terhadap persatuan dan keadilan yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai warga negara yang mencintai tanah air, kita sepatutnya mengetahui dan memahami sejarah terbentuknya NKRI, agar dapat menjaga dan memelihara persatuan serta kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kronologi Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI):

Sejarah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diawali dengan dibacakannya teks proklamasi oleh Ir. Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi tersebut merupakan puncak dari serangkaian peristiwa yang melatarbelakangi kemerdekaan Indonesia. Berikut ini adalah kronologi penting yang mengarah pada lahirnya NKRI:

29 April 1945

Pemerintah Jepang mendirikan BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia), yang dalam bahasa Jepang dikenal sebagai Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai. BPUPKI ini terdiri dari 63 orang anggota yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.

6 Agustus 1945

Sebuah bom atom dijatuhkan oleh Amerika Serikat di kota Hiroshima, Jepang, yang pada saat itu masih menjajah Indonesia. Peristiwa ini menjadi titik balik dalam Perang Dunia II.

7 Agustus 1945

BPUPKI berubah menjadi PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia), yang dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi inkai, untuk lebih fokus pada persiapan kemerdekaan Indonesia.

9 Agustus 1945

Bom atom kedua dijatuhkan di kota Nagasaki, yang semakin memaksa Jepang untuk menyerah kepada Sekutu. Keadaan ini dimanfaatkan oleh para pejuang kemerdekaan Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaan.

10 Agustus 1945

Sutan Syahrir mendengar melalui radio bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Hal ini semakin mendorong semangat perjuangan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sutan Syahrir mendesak Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

15 Agustus 1945

Jepang secara resmi menyerah kepada Sekutu, menandakan berakhirnya Perang Dunia II di kawasan Asia Pasifik.

16 Agustus 1945

Pada dini hari, sekelompok pemuda membawa Soekarno dan Hatta beserta keluarga ke Rengasdengklok dengan tujuan untuk mengisolasi mereka dari pengaruh Jepang. Di Jakarta, Wikana dan Mr. Ahmad Soebarjo sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yusuf Kunto diutus untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Keduanya kembali ke Jakarta dan menuju rumah Nishimura, kemudian dibawa ke rumah Laksamana Maeda untuk menyusun konsep proklamasi.

17 Agustus 1945

Pagi hari, tepat pukul 10:00 WIB, teks proklamasi dibacakan oleh Ir. Soekarno di kediamannya, Jl. Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta. Pada saat yang sama, bendera Merah Putih yang dijahit oleh Fatmawati, istri Soekarno, dikibarkan. Peristiwa tersebut disambut dengan gembira oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai simbol kemerdekaan yang telah dicapai.

18 Agustus 1945

PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan menyatakan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam sidang tersebut, Ir. Soekarno dan Moh. Hatta terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Berikut adalah isi teks proklamasi yang telah dikonsep oleh Ir. Soekarno dan disahkan pada 17 Agustus 1945 :

Proklamasi

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.

Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain, diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Djakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05

Atas nama bangsa Indonesia,

Soekarno/Hatta

Demikianlah rangkaian peristiwa yang mengarah pada terbentuknya NKRI, yang ditandai dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Peristiwa ini tidak hanya menjadi momen bersejarah bagi bangsa Indonesia, tetapi juga sebagai bukti perjuangan dan komitmen terhadap kemerdekaan serta persatuan bangsa.

### Wilayah

Wilayah merupakan salah satu unsur utama dalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara geografis, Indonesia terdiri dari wilayah kepulauan yang sangat luas, dengan batas-batas yang jelas, baik daratan maupun perairan. Berikut adalah beberapa aspek terkait wilayah dalam konteks pembentukan NKRI:

a. Batas Wilayah

Batas wilayah merupakan garis batas pemisah kedaulatan suatu negara, yang didasarkan atas hukum internasional. Secara geografis, Indonesia diapit oleh dua benua, yakni Benua Asia di sebelah Utara dan Benua Australia di sebelah Selatan, juga dua samudera, yakni Samudera Pasifik di sebelah Timur dan Samudera Hindia di Sebelah Barat. Letak geografis Indonesia yang strategis, tentu membuat konsekuensi berbagai negara yang ada di dalamnya.

b. Sengketa Wilayah

Dalam hal ini, seringkali perbatasan wilayah Indonesia dengan negara-negara lainnya berisiko menimbulkan kesalahpahaman. Sehingga, hal tersebut biasanya berakhir dengan kemunculan konflik.

Sebagai contoh, berdasarkan data tahun 2009 oleh Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS), menyebutkan jika Indonesia masih memiliki sejumlah sengketa batas wilayah perbatasan yang belum terselesaikan.

Misalnya, Indonesia memiliki batas barat dengan tiga negara, yaitu Papua Nugini, Timor Leste, dan Malaysia. Tapi, di antara ketiga negara itu, yang memiliki titik rawan dan sering terjadi sengketa adalah dengan Malaysia.

Nyatanya, wilayah perbatasan sebuah negara baik dilihat dari sudut pandang perbatasan kabupaten/kota di satu provinsi atau antar provinsi, berperan penting dan memiliki arti vital dan strategis. Jika mengacu pada Pasal 2 ayat (1) Permendagri Nomor 76 Tahun 2012, pentingnya wilayah perbatasan adalah karena menyangkut pertahanan dan keamanan suatu negara, sosial, ekonomi, serta budaya.

Sehingga, untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan negara, harus adanya kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah. Sejatinya, regulasi batas wilayah negara telah diatur dalam UUD 1945 1945 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

c. Kedaulatan Bangsa

Asas kedaulatan adalah pengelolaan wilayah negara yang wajib senantiasa diperhatikan, demi tetap terjaganya keutuhan wilayah NKRI.

Dalam mewujudkan UUD 1945 mengenai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia atas kedaulatan wilayah, perlu adanya pengaturan-pengaturan kewilayahan secara nasional, mengenai:

* Perairan
* Daratan/tanah
* Udara
* Ruang
* Sumber kekayaan alam dan lingkungannya.

### 3. Ideologi

Pancasila, sebagai dasar filsafat dan ideologi negara Indonesia, tidak terbentuk secara mendadak dan bukan hanya diciptakan oleh seorang individu, sebagaimana yang terjadi pada ideologi-ideologi lainnya di dunia. Sebaliknya, Pancasila lahir melalui proses panjang dalam sejarah bangsa Indonesia, yang mencerminkan perjalanan dan dinamika perjuangan untuk mencapai kemerdekaan serta membangun negara yang berdaulat. Sebagai ideologi negara, Pancasila menjadi landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, memberikan pedoman dalam segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia.

Ideologi pada hakikatnya adalah seperangkat gagasan yang memuat penjelasan mengenai cita-cita, nilai-nilai yang ingin dicapai, serta cara untuk mewujudkannya. Ideologi berfungsi sebagai pedoman bagi suatu komunitas untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah disepakati. Dalam pengertian luas, ideologi mencakup gagasan-gagasan yang diakui dan dijadikan pedoman oleh suatu bangsa atau negara, meskipun tidak selalu disebutkan secara tersurat.

Secara etimologi, Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta, yang terdiri dari dua kata: panca yang berarti lima, dan sila yang berarti dasar. Dengan demikian, Pancasila berarti lima dasar yang menjadi landasan hidup bangsa Indonesia. Pancasila adalah ideologi yang dikemukakan oleh Ir. Soekarno, yang bertujuan untuk menyatukan bangsa Indonesia dalam kerangka negara yang merdeka dan berdaulat.

Pancasila bukan hanya dijadikan ideologi bagi bangsa Indonesia, tetapi juga menjadi ideologi negara. Sebagai ideologi negara, Pancasila berfungsi sebagai dasar hukum yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap kebijakan negara dan tindakan pejabat pemerintahan harus mengacu pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila bukan hanya sebuah konsep teori, tetapi juga merupakan pedoman praktis yang menjadi identitas bangsa Indonesia.

* Pancasila dalam Sejarah Pembentukan NKRI

Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai dasar ideologi negara, Pancasila telah mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan bersama dalam menjaga persatuan, keadilan, dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Pancasila menjadi fondasi yang kokoh bagi negara yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya, serta memberikan landasan moral dan etika dalam membangun NKRI yang berbentuk negara kesatuan.

Proses penerapan Pancasila sebagai ideologi negara dimulai sejak awal kemerdekaan Indonesia. Pada masa Orde Lama, Pancasila menjadi pedoman dalam membangun negara yang baru merdeka, meskipun pada kenyataannya, dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai penyelewengan terhadap nilai-nilai Pancasila. Situasi dalam negeri yang belum stabil, dengan berbagai pemberontakan dan ketidakpastian global, menyebabkan penerapan Pancasila belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

Pada masa Orde Baru, pemerintahan Soeharto berkomitmen untuk mengamalkan Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam periode ini, Pancasila dijadikan sebagai ideologi negara yang harus diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, nilai-nilai Pancasila sering kali dimanipulasi untuk kepentingan kekuasaan, seperti melalui Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), yang justru mengekang kebebasan berpendapat dan memperpanjang masa jabatan presiden tanpa adanya pengawasan yang memadai.

Setelah jatuhnya Orde Baru, Indonesia memasuki masa Reformasi, di mana terdapat komitmen baru untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila secara lebih konsisten dan menyeluruh. Pada periode ini, berbagai kebijakan yang bertentangan dengan Pancasila dihapus atau diganti dengan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai dasar tersebut. Pancasila kembali dijadikan pedoman utama dalam setiap kebijakan dan keputusan negara.

* Lima Sila dalam Pancasila :

Pancasila mengandung lima nilai utama yang menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia, yang diterjemahkan dalam lima sila berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila pertama ini mencerminkan keyakinan bahwa Indonesia mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa, serta memberikan kebebasan beragama bagi seluruh rakyat Indonesia.

1. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila kedua mengajarkan penghargaan terhadap martabat setiap individu, serta komitmen untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

1. Persatuan Indonesia

Sila ketiga menekankan pentingnya persatuan dalam keragaman. Indonesia, yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya, harus tetap bersatu demi kepentingan bangsa.

1. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Sila keempat menegaskan bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan demokratis, di mana keputusan-keputusan penting diambil melalui musyawarah untuk mufakat, dengan menghormati kebijaksanaan para pemimpin.

1. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila kelima mengedepankan keadilan sosial, di mana negara berkomitmen untuk menciptakan kesejahteraan dan pemerataan bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa adanya diskriminasi.

### 4. Konstitusi

Konstitusi adalah seperangkat prinsip, norma, aturan, dan nilai-nilai dasar yang mengatur dan mengorganisasi pemerintahan suatu negara. Sebagai hukum tertinggi dalam negara, konstitusi berfungsi untuk memberikan kerangka kerja bagi sistem politik, pembagian kekuasaan pemerintah, hak-hak warga negara, serta hubungan antara pemerintah dan rakyat. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang tidak hanya berfungsi sebagai pedoman hukum, tetapi juga sebagai landasan negara yang menjamin keutuhan dan kedaulatan NKRI.

Pengertian Konstitusi Menurut Para Ahli

Beberapa ahli memberikan definisi konstitusi yang memperkaya pemahaman kita mengenai pentingnya konstitusi dalam pembentukan NKRI. M. Solly Lubis menjelaskan bahwa istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis constituer, yang berarti "membentuk," yang merujuk pada pembentukan negara atau penyusunan serta penetapan negara sebagai entitas yang sah. Sementara itu, Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa konstitusi adalah suatu dokumen yang mengandung aturan dasar mengenai negara, yaitu prinsip-prinsip yang menjadi dasar dari segala peraturan yang berlaku di negara tersebut.

Sri Soemantri Martosoewignjo menambahkan bahwa konstitusi dapat dipahami dalam arti sempit dan luas. Dalam arti sempit, konstitusi dituangkan dalam suatu dokumen tertulis, seperti undang-undang dasar, sedangkan dalam arti luas, konstitusi mencakup prinsip-prinsip dan konvensi yang menjadi dasar bagi sistem pemerintahan negara tersebut, meskipun tidak selalu tertulis.

a. Sejarah Konstitusi di Indonesia

Sejarah konstitusi di Indonesia mencerminkan perjalanan panjang bangsa Indonesia dalam menentukan bentuk negara yang merdeka dan berdaulat. Berikut adalah rangkuman sejarah konstitusi Indonesia:

* Zaman Kolonial: Pada masa penjajahan Belanda, Indonesia tidak memiliki konstitusi formal. Namun, pada tahun 1922, Belanda memberikan Undang-Undang Tata Negara (Staatsinrichting) yang memberikan sedikit otonomi kepada Hindia Belanda.
* Proklamasi Kemerdekaan (17 Agustus 1945): Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno dan Mohammad Hatta. Pada saat itu, meskipun belum ada konstitusi tertulis, Proklamasi kemerdekaan menjadi landasan awal negara Indonesia yang merdeka.
* UUD 1945: Pada 18 Agustus 1945, UUD 1945 disahkan sebagai konstitusi pertama Indonesia, yang mengatur prinsip-prinsip dasar negara.
* Konstitusi RIS (1949): Setelah Indonesia mengadopsi sistem Republik Indonesia Serikat (RIS), diadopsi konstitusi baru. Namun, konstitusi ini hanya berlaku sementara, dan pada tahun 1950, Indonesia kembali menggunakan UUD 1945 sebagai konstitusi negara.
* Era Reformasi dan Amendemen UUD 1945: Setelah reformasi 1998, UUD 1945 mengalami amandemen untuk memperkuat demokrasi dan memperkenalkan konsep otonomi daerah.
* Sejarah ini menunjukkan bagaimana konstitusi Indonesia telah berkembang untuk menciptakan negara yang lebih demokratis, adil, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

b. Fungsi Konstitusi dalam NKRI

Konstitusi berperan sangat penting dalam struktur dan sistem pemerintahan suatu negara, termasuk dalam pembentukan NKRI. Berikut adalah beberapa fungsi utama konstitusi dalam NKRI:

1) Mengatur Pembagian Kekuasaan: Konstitusi mengatur bagaimana kekuasaan dibagi antara cabang-cabang pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

2) Menjamin Hak Asasi Manusia: UUD 1945 menjamin hak-hak dasar warga negara, seperti hak untuk hidup, hak untuk bekerja, hak atas pendidikan, dan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.

3) Mengatur Hubungan antara Pemerintah dan Rakyat: Konstitusi menentukan bagaimana hubungan antara pemerintah dan rakyat, termasuk kewajiban pemerintah untuk melindungi hak-hak warganya dan memberikan keadilan.

4) Menetapkan Sistem Pemerintahan: UUD 1945 mengatur sistem pemerintahan presidensial yang menjamin bahwa kepala negara (presiden) juga menjadi kepala pemerintahan, sekaligus penggerak kebijakan negara.

5) Mengatur Proses Perubahan atau Amandemen: Konstitusi menyediakan prosedur yang jelas untuk melakukan amandemen jika diperlukan untuk mengikuti perubahan zaman atau kebutuhan negara.

6) Menentukan Batasan Kekuasaan Pemerintah: Konstitusi juga menetapkan batasan terhadap kekuasaan pemerintah untuk memastikan bahwa semua tindakan pemerintah tetap berada dalam kerangka hukum yang berlaku.

### 5. Sejarah

Tujuan berdirinya negara Republik Indonesia tercantum dengan jelas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, yang menggariskan empat tujuan utama, yaitu:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial

Tujuan-tujuan tersebut bukanlah sekadar sebuah deklarasi yang tertulis dalam dokumen sejarah, melainkan komitmen yang harus diwujudkan melalui berbagai tindakan nyata oleh seluruh elemen negara, baik pemerintah maupun masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, sejumlah langkah konkret dapat diambil oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

1. Menegakkan Hak

Dalam rangka mewujudkan tujuan negara untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia, penting untuk memastikan hak-hak asasi manusia setiap warga negara terlindungi dengan baik. Sebagai negara demokrasi, setiap individu berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sama, hak untuk bekerja, serta hak untuk menyuarakan pendapat. Pemenuhan hak-hak tersebut menjadi patokan utama untuk menjaga keutuhan negara dan memastikan bahwa seluruh tumpah darah Indonesia dilindungi dari segala bentuk ketidakadilan.

2. Menggunakan Produk Lokal

Untuk mencapai tujuan memajukan kesejahteraan umum, Indonesia perlu mendorong pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti sandang, pangan, dan papan. Salah satu cara efektif untuk mempercepat kesejahteraan ekonomi adalah dengan menggunakan produk lokal. Dengan memprioritaskan produk dalam negeri, perekonomian rakyat dapat berkembang, lapangan pekerjaan tercipta, dan negara dapat mencapai stabilitas ekonomi yang lebih baik. Gerakan menggunakan produk lokal tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan materi, tetapi juga mencerminkan semangat gotong-royong yang merupakan budaya bangsa Indonesia.

3. Pendidikan yang Layak

Sebagai salah satu tujuan utama negara, mencerdaskan kehidupan bangsa harus menjadi perhatian utama baik pemerintah maupun masyarakat. Hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya harus dihormati dan diperjuangkan. Meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh penjuru negeri, terutama di daerah-daerah terpencil, adalah tantangan besar yang harus dihadapi. Selain pendidikan akademik, pendidikan moral dan karakter juga sangat penting untuk mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat.

4. Saling Menghargai

Tujuan negara yang keempat, yaitu untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, mengharuskan seluruh masyarakat Indonesia untuk menjunjung tinggi toleransi. Mengingat Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan keragaman suku, budaya, dan agama, saling menghargai perbedaan menjadi kunci dalam menciptakan keharmonisan. Selain itu, sikap saling menghargai dan menghormati juga harus diterapkan dalam hubungan antarbangsa, menjaga hubungan internasional yang damai dan berkeadilan.

Unsur-Unsur Pembentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Dalam mencapai tujuan tersebut, unsur-unsur pembentuk NKRI menjadi hal yang sangat vital. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk oleh tiga unsur utama:

1. Wilayah

Wilayah Indonesia yang meliputi daratan, lautan, dan udara merupakan bagian integral dari NKRI yang harus dijaga keutuhan dan kedaulatannya.

1. Rakyat

Rakyat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan budaya adalah unsur penting yang membentuk karakter dan identitas bangsa Indonesia. Keberagaman ini harus dijaga dan dihargai sebagai bagian dari kekuatan negara.

1. Pemerintahan yang Sah

Pemerintah Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kewajiban untuk menjalankan fungsi negara, memajukan kesejahteraan rakyat, dan menjaga ketertiban negara sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Keberhasilan dalam mencapai tujuan negara dan menjaga keutuhan NKRI sangat bergantung pada komitmen seluruh komponen bangsa, baik dalam menjalankan hak dan kewajiban, menghargai keberagaman, serta berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan. Dengan begitu, Indonesia akan terus berkembang dan maju menuju cita-cita yang diinginkan dalam Pembukaan UUD 1945.

### 6. Bangsa

Keberagaman suku, agama, dan budaya merupakan salah satu ciri khas yang melekat pada bangsa Indonesia, yang menjadi kekuatan sekaligus tantangan dalam membangun sebuah negara yang bersatu dan maju. Keberagaman ini juga merupakan salah satu unsur penting yang membentuk identitas dan karakter bangsa Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi seluruh warga negara Indonesia untuk memahami dan menghargai perbedaan tersebut, agar terjalin kerukunan dan kedamaian yang mendukung tercapainya tujuan negara.

1. Keberagaman Suku

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki beragam suku bangsa, lebih dari 1.300 suku yang tersebar di seluruh penjuru nusantara. Setiap suku memiliki ciri khas, adat istiadat, bahasa, dan tradisi yang berbeda, yang memperkaya budaya bangsa. Keberagaman ini adalah bagian dari kekayaan budaya Indonesia yang tidak hanya memperkaya kehidupan sosial masyarakat, tetapi juga memberikan kekuatan dalam membangun rasa solidaritas dan kebersamaan antar suku.

Pentingnya suku bangsa dalam konteks NKRI adalah bagaimana setiap suku dapat berperan dalam menjaga kerukunan dan persatuan. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia menjunjung tinggi semangat “Bhinneka Tunggal Ika” (berbeda-beda tetapi tetap satu) sebagai prinsip dasar dalam mengelola keberagaman suku yang ada.

1. Keberagaman Agama

Indonesia juga dikenal sebagai negara dengan keberagaman agama yang sangat tinggi. Sebagian besar penduduk Indonesia menganut agama Islam, tetapi Indonesia juga memiliki pemeluk agama Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan agama-agama tradisional lainnya. Keberagaman agama ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan komitmen yang kuat terhadap toleransi dan kebebasan beragama.

Pentingnya keberagaman agama dalam konteks bangsa Indonesia adalah bagaimana negara mengakui hak setiap individu untuk menganut dan menjalankan agamanya dengan bebas, tanpa adanya diskriminasi. Dalam membangun sebuah negara yang demokratis dan adil, sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan agama menjadi kunci untuk terciptanya perdamaian dan keharmonisan di tengah keberagaman.

1. Keberagaman Budaya

Selain suku dan agama, keberagaman budaya juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Budaya Indonesia sangat kaya dan beragam, mulai dari seni, musik, tarian, pakaian adat, hingga tradisi dan kuliner yang berbeda-beda di setiap daerah. Keberagaman budaya ini memberikan warna yang unik dan menarik, menjadikan Indonesia sebagai negara yang kaya akan nilai-nilai budaya yang luhur.

Budaya juga berperan penting dalam memperkuat rasa kebangsaan dan identitas nasional. Masyarakat Indonesia harus bangga akan budaya mereka dan terus berupaya untuk menjaga serta melestarikan warisan budaya yang ada, sambil tetap terbuka terhadap perkembangan zaman. Hal ini penting untuk menjaga kesatuan dan persatuan, agar keberagaman budaya tidak menjadi pemecah belah, melainkan justru mempererat hubungan antarwarga negara.

1. Tantangan dan Harapan dalam Keberagaman

Meskipun keberagaman suku, agama, dan budaya merupakan kekayaan Indonesia, namun keberagaman ini juga menghadirkan tantangan, terutama dalam hal toleransi dan kerukunan sosial. Konflik sosial, diskriminasi, dan ketidakadilan sering kali muncul karena perbedaan ini. Oleh karena itu, penting bagi setiap warga negara Indonesia untuk menumbuhkan rasa saling menghargai, saling menghormati, dan saling menerima perbedaan.

Pendidikan yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dapat menjadi sarana yang efektif untuk membangun karakter bangsa yang inklusif, menghargai keberagaman, dan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Pemerintah, lembaga pendidikan, serta masyarakat memiliki peran penting dalam mengedukasi generasi muda untuk menghargai keberagaman dan menjaga kerukunan antarumat beragama, suku, dan budaya.

Dengan semangat gotong royong, Indonesia dapat menjadikan keberagaman ini sebagai kekuatan untuk membangun bangsa yang lebih maju, damai, dan sejahtera. Keberagaman bukanlah hal yang harus dipandang sebagai penghalang, melainkan sebagai sebuah potensi besar untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

BAB 2

BAB 2

## Peran Lembaga Negara Dalam Menjaga NKRI

Lembaga negara memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara umum, lembaga-lembaga negara di Indonesia bertugas untuk menjaga stabilitas negara, memperkuat hukum, dan memastikan bahwa segala kebijakan negara selaras dengan Pancasila dan UUD 1945. Berikut adalah beberapa peran lembaga negara dalam menjaga NKRI:

### 1. Presiden

Peran Presiden dalam Menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sangat krusial, mengingat posisi Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Berikut adalah beberapa peran utama yang dijalankan oleh Presiden dalam menjaga NKRI:

a. Pemimpin Eksekutif dan Pengambil Keputusan Utama

Sebagai kepala pemerintahan, Presiden memiliki peran sebagai pemimpin eksekutif yang bertanggung jawab atas pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah. Presiden berperan langsung dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang berdampak luas terhadap kestabilan negara, seperti kebijakan ekonomi, sosial, politik, dan pertahanan. Dengan kebijakan yang bijaksana dan memperhatikan kebutuhan nasional, Presiden berperan menjaga integritas NKRI.

b. Penjaga Kedaulatan Negara

Presiden juga bertanggung jawab untuk menjaga kedaulatan negara baik dari ancaman luar maupun dalam negeri. Presiden, dengan bantuan aparat militer (TNI) dan kepolisian (Polri), harus dapat mengatasi ancaman yang dapat merusak keutuhan wilayah NKRI, seperti ancaman dari negara lain, separatisme, terorisme, atau konflik internal yang berpotensi memperburuk stabilitas nasional.

c. Perwujudan Pancasila dan UUD 1945

Presiden wajib menegakkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam setiap kebijakan dan tindakan pemerintahan. Kedua dasar negara ini menjadi landasan dalam membuat keputusan yang dapat mempengaruhi keberlangsungan negara. Sebagai contoh, Presiden harus memastikan bahwa setiap kebijakan negara tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara yang menegakkan keadilan sosial, persatuan, dan keberagaman bangsa Indonesia.

d. Pemimpin Tertinggi TNI dan Polri

Presiden sebagai komandan tertinggi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan kepala kepolisian negara (Polri) memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban. Tugas ini sangat penting dalam mencegah dan menanggulangi ancaman terhadap NKRI, baik yang datang dari luar negeri (seperti ancaman militer) maupun dari dalam negeri (seperti terorisme atau pemberontakan).

f. Mewakili Indonesia di Dunia Internasional

Sebagai kepala negara, Presiden juga berperan sebagai perwakilan Indonesia di dunia internasional. Dalam konteks ini, Presiden bertanggung jawab untuk menjalin hubungan diplomatik, memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional, serta memastikan bahwa kepentingan nasional selalu terjaga. Diplomasi yang berhasil akan mendukung stabilitas dan keamanan negara serta memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan berdiri tegak sebagai bagian dari NKRI.

g. Menjamin Kesejahteraan Rakyat

Presiden memimpin dan memastikan jalannya pembangunan ekonomi dan sosial yang merata di seluruh Indonesia. Dengan kebijakan yang tepat dan responsif, Presiden dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang pada gilirannya dapat memperkuat persatuan bangsa. Kesejahteraan rakyat yang merata akan mengurangi ketimpangan antar daerah dan memperkuat rasa kebangsaan serta persatuan dalam kerangka NKRI.

h. Menjamin Hak Asasi Manusia (HAM)

Presiden memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia di Indonesia, yang tercermin dalam kebijakan-kebijakan yang tidak hanya berpihak pada kepentingan mayoritas, tetapi juga melindungi kelompok-kelompok minoritas dan mencegah diskriminasi. Perlindungan terhadap HAM adalah bagian dari menjaga keutuhan dan keseimbangan sosial di dalam negara.

i. Mengatasi Krisis dan Konflik

Dalam kondisi krisis, baik itu bencana alam, ekonomi, atau konflik sosial, Presiden harus memimpin penanggulangan masalah tersebut dengan bijak. Keputusan yang cepat dan tepat dari Presiden dalam menghadapi bencana atau ketegangan sosial sangat penting untuk mencegah terjadinya disintegrasi bangsa dan menjaga keutuhan NKRI.

j. Menjaga Stabilitas Politik dan Demokrasi

Sebagai pemimpin demokratis, Presiden harus menjaga agar demokrasi berjalan dengan baik. Itu berarti mendukung kebebasan berekspresi, menghargai hak politik warga negara, dan memastikan bahwa pemerintahan tetap transparan dan akuntabel. Demokrasi yang sehat akan memperkuat kepercayaan rakyat pada sistem politik, yang pada gilirannya mendukung keberlanjutan NKRI.

k. Fungsi sebagai Ketua Lembaga Negara yang Lain

Selain sebagai kepala pemerintahan, Presiden juga berperan dalam penunjukan pejabat negara seperti Menteri, Ketua KPK, Ketua MK, dan lainnya yang memiliki fungsi vital dalam menjaga keberlangsungan dan kestabilan negara. Dengan menunjuk pejabat yang berkompeten, Presiden membantu memastikan sistem pemerintahan berjalan dengan baik dan negara tetap dalam jalur yang benar sesuai dengan konstitusi.

### 2. DPR/MPR

DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)\*\* memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), masing-masing dalam kapasitasnya sebagai lembaga legislatif dan lembaga yang merumuskan arah kebijakan negara. Berikut adalah peran kedua lembaga ini dalam menjaga NKRI:

a. Peran DPR

1) Membuat Undang-Undang yang Menjaga Keutuhan NKRI

DPR memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang yang mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini, DPR berperan untuk memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan mendukung persatuan, keadilan sosial, dan menjaga integritas NKRI. Misalnya, undang-undang yang terkait dengan desentralisasi, otonomi daerah, atau kebijakan luar negeri yang dapat mempengaruhi hubungan antar daerah dan negara.

2) Pengawasan Terhadap Pemerintah

DPR berfungsi sebagai lembaga pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Fungsi pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah tidak merugikan kepentingan nasional, tidak melanggar konstitusi, dan tidak mengancam kesatuan negara. Jika ditemukan penyimpangan atau kebijakan yang berpotensi merusak keutuhan NKRI, DPR memiliki hak untuk menyuarakan koreksi dan mendorong perbaikan.

b. Peran MPR

1) Menjaga Konsistensi Pancasila dan UUD 1945

MPR memiliki tugas untuk memastikan bahwa setiap perubahan atau amandemen terhadap UUD 1945 sejalan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai lembaga yang berwenang mengubah dan mengamandemen UUD 1945, MPR memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga agar perubahan tersebut tidak mengarah pada pembubaran atau perpecahan NKRI. MPR juga memiliki kewajiban untuk memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa melalui nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945.

2) Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden

MPR memiliki kewenangan untuk melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilu. Proses ini merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang memperkuat legitimasi pemerintahan dan menjaga kelangsungan kepemimpinan nasional. Dengan cara ini, MPR berperan dalam memastikan stabilitas politik yang mendukung keberlanjutan NKRI.

c. Kolaborasi DPR dan MPR dalam Menjaga NKRI

Baik DPR maupun MPR memiliki tugas yang saling melengkapi. Dalam menjalankan tugasnya, keduanya berkolaborasi untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dan setiap perubahan yang terjadi tidak hanya memperhatikan aspek teknis, tetapi juga aspek sosial dan politik yang mendukung persatuan dan keutuhan NKRI. Sebagai contoh, setiap perubahan yang diusulkan dalam UUD 1945 harus mendapatkan persetujuan dari MPR dan DPR agar dapat dipastikan sejalan dengan kebutuhan bangsa.

### 3. MA & MK

Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), terutama dalam konteks penegakan hukum, konstitusi, dan keadilan. Kedua lembaga ini berfungsi untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip dasar negara seperti Pancasila dan UUD 1945 dihormati dan diimplementasikan dengan benar. Berikut adalah peran masing-masing lembaga:

a. Peran MA

1) Penegakan Hukum dan Keadilan

Mahkamah Agung (MA) berfungsi sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Sebagai pengadilan kasasi, MA memastikan bahwa keputusan pengadilan tingkat pertama dan banding yang melibatkan kepentingan hukum nasional diselesaikan dengan adil, sesuai dengan hukum yang berlaku. MA mengawasi dan memastikan agar hukum diterapkan secara konsisten dan tidak ada keputusan yang mengabaikan prinsip keadilan.

2) Menjaga Kepastian Hukum

MA memiliki peran untuk menciptakan kepastian hukum bagi seluruh warga negara Indonesia. Salah satu peran penting MA adalah memberikan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak jelas atau berpotensi menimbulkan perbedaan tafsiran. Keputusan MA menjadi acuan dalam penegakan hukum di seluruh Indonesia, sehingga memperkuat sistem hukum negara yang berbasis pada UUD 1945.

3) Menguji Keberlakuan Peraturan Perundang-undangan

MA juga berfungsi untuk menguji peraturan perundang-undangan yang lebih rendah (seperti peraturan pemerintah atau peraturan daerah) terhadap undang-undang yang lebih tinggi. Fungsi ini penting untuk memastikan bahwa peraturan daerah atau kebijakan pemerintah tidak bertentangan dengan hukum nasional yang berlaku, serta dengan Pancasila dan UUD 1945, sehingga dapat menghindari potensi konflik yang dapat merusak kesatuan NKRI.

4) Mencegah Disintegrasi Sosial

Sebagai lembaga yang mengawasi jalannya proses peradilan, MA memiliki peran dalam mencegah disintegrasi sosial. Keputusan-keputusan yang diambil oleh MA harus mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial dan menghormati hak-hak asasi manusia (HAM), sehingga masyarakat merasa terlindungi dan kepercayaan terhadap sistem hukum tetap terjaga.

b. Peran MK

1) Menjaga Konstitusi dan UUD 1945

Mahkamah Konstitusi (MK) berfungsi untuk mengawasi agar seluruh kebijakan dan undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif dan eksekutif tetap sejalan dengan UUD 1945. MK memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang dan kebijakan yang diambil pemerintah atau DPR, memastikan bahwa tidak ada kebijakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara.

2) Menjaga Hak Konstitusional Warga Negara

MK juga memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa mengenai hak konstitusional warga negara, termasuk yang terkait dengan pemilu, hak pilih, dan hak politik lainnya. Dengan menjaga hak konstitusional ini, MK berperan dalam memperkuat sistem demokrasi dan mencegah terjadinya ketidakadilan yang dapat memecah belah bangsa.

3) Menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilu

Salah satu peran MK yang sangat penting adalah menyelesaikan sengketa hasil pemilu. MK bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa terkait hasil pemilu legislatif, pemilu presiden, atau pemilu kepala daerah. Fungsi ini sangat penting untuk memastikan bahwa pemilu berjalan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku di Indonesia, serta untuk menjaga integritas NKRI dalam konteks politik yang stabil.

4) Menjaga Keutuhan Negara dan Demokrasi

MK juga memiliki peran dalam menjaga keutuhan negara dan demokrasi. Melalui pengawasan terhadap amandemen atau perubahan terhadap UUD 1945, MK memastikan bahwa perubahan yang dilakukan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. MK juga mengawasi agar proses demokrasi berlangsung dengan adil, sehingga tidak ada kelompok atau individu yang bisa merusak sistem konstitusional yang telah disepakati bersama.

c. Kolaborasi MA dan MK dalam Menjaga NKRI

MA dan MK bekerja sama dalam menjaga sistem hukum Indonesia yang berlandaskan pada UUD 1945. MA fokus pada penegakan hukum di tingkat peradilan, sementara MK fokus pada pengawasan dan pengujian kebijakan yang berkaitan dengan konstitusi. Keduanya bekerja dengan tujuan yang sama, yaitu memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh negara tetap sejalan dengan prinsip negara kesatuan yang demokratis, berdaulat, dan adil.

### 4. TNI & POLRI

Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keduanya adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara, serta memastikan bahwa stabilitas politik dan sosial di Indonesia terjaga dengan baik. Berikut adalah penjelasan mengenai peran TNI dan Polri dalam menjaga NKRI:

a. Peran Tentara Nasional Indonesia (TNI)

1) Pertahanan Negara

TNI memiliki tugas utama untuk melindungi dan mempertahankan NKRI dari ancaman luar dan dalam negeri. Sebagai lembaga yang berfungsi sebagai pertahanan negara, TNI memiliki kewajiban untuk menjaga kedaulatan wilayah Indonesia baik di darat, laut, maupun udara. TNI bertanggung jawab dalam menjaga keutuhan wilayah negara dari ancaman militer dan invasi dari negara asing.

2) Mengatasi Ancaman Militer dan Non-Militer

Selain ancaman militer yang jelas berupa agresi dari negara lain, TNI juga memiliki kewajiban untuk mengatasi ancaman non-militer, seperti terorisme, separatisme, dan pergerakan yang mengancam integritas NKRI. Hal ini termasuk dalam peran TNI dalam operasi militer selain perang (OMSP), di mana TNI turut serta dalam mengatasi bencana alam, menjaga ketertiban di daerah rawan konflik, dan menangani ancaman yang dapat memecah belah bangsa.

3) Menjaga Keamanan Wilayah Perbatasan

TNI memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan antara Indonesia dan negara tetangga. Mengingat panjangnya garis perbatasan Indonesia yang melibatkan berbagai pulau, TNI harus melakukan patroli dan pengawasan untuk memastikan tidak ada penyusupan, pelanggaran wilayah, atau ancaman yang dapat merusak kedaulatan Indonesia.

4) Pencegahan Dan Pengendalian konflik Sosial

TNI berperan dalam membantu pencegahan konflik sosial yang dapat mengancam persatuan bangsa, seperti dalam konflik antar etnis atau agama. Dalam hal ini, TNI bertugas untuk menjaga ketertiban dan membantu meredakan ketegangan yang dapat menyebabkan disintegrasi sosial dan politik.

2. Peran Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

1) Menjaga Keamanan dan Ketertiban Umum

Polri memiliki tugas utama untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Polri bertugas untuk menjaga agar kehidupan sosial berjalan dengan aman, tertib, dan damai. Polisi bertanggung jawab untuk menangani kejahatan, pelanggaran hukum, dan situasi yang dapat mengganggu stabilitas sosial dalam masyarakat.

2) Menegakkan Hukum

Sebagai lembaga penegak hukum, Polri berperan penting dalam membasmi tindak kriminal dan mengadili kasus hukum, baik itu kasus pidana, kejahatan terorganisir, maupun pelanggaran lainnya. Polri menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pelanggaran hukum, yang sangat penting untuk memastikan adanya keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara.

3) Melindungi Warga Negara dan Mencegah Ancaman Keamanan Dalam Negeri

Polri berfungsi untuk melindungi hak-hak warga negara dari ancaman kejahatan, seperti perampokan, kekerasan, terorisme, dan ancaman internal lainnya. Polri juga memiliki peran dalam pencegahan dan penanggulangan ancaman non-tradisional seperti radikalisasi, terorisme, dan organisasi terlarang yang dapat merusak kesatuan bangsa dan NKRI.

4) Pemeliharaan Ketertiban Sosial

Polri berperan dalam menjaga ketertiban sosial di berbagai situasi, baik dalam masa damai maupun dalam situasi genting. Misalnya, saat ada protes atau demonstrasi, Polri harus memastikan bahwa kegiatan tersebut berlangsung dengan damai dan tidak menimbulkan kerusuhan yang dapat mengancam persatuan dan integritas NKRI.

5. Menyelesaikan Konflik Sosial dan Masyarakat

Polri juga memiliki tugas untuk menangani konflik social yang dapat mengancam persatuan bangsa. Polisi memiliki peran dalam mengatasi permasalahan sosial yang berpotensi menyebabkan kerusuhan atau ketegangan antar kelompok dalam masyarakat. Mereka bertugas untuk melakukan mediasi dan penegakan hukum untuk mencegah terjadinya perpecahan.

c. Kolaborasi TNI dan Polri dalam Menjaga NKRI

Koordinasi dalam Keamanan Nasional: TNI dan Polri memiliki kewenangan yang berbeda, namun keduanya sering kali bekerja bersama dalam menjaga keamanan nasional. TNI lebih fokus pada pertahanan militer dan ancaman eksternal, sedangkan Polri lebih pada penegakan hukum dan keamanan dalam negeri. Kolaborasi antara keduanya sangat penting, terutama dalam menangani ancaman yang bersifat kompleks dan multidimensional seperti terorisme, separatisme, atau kerusuhan sosial.

### 5. Kementerian/Lembaga Lain dalam Menjaga NKRI

Selain TNI dan Polri, berbagai kementerian dan lembaga negara lainnya juga berperan penting dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Berikut adalah beberapa kementerian dan lembaga lainnya serta peran mereka dalam menjaga stabilitas dan keutuhan NKRI:

a. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

1) Mengelola Pemerintahan Daerah

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki tugas untuk memastikan pemerintahan daerah berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip desentralisasi yang diatur dalam UUD 1945. Kemendagri bertugas memastikan agar kebijakan di tingkat daerah tidak bertentangan dengan hukum negara dan dapat memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia.

2) Pengendalian Konflik Sosial di Daerah

Kemendagri berperan dalam melakukan pencegahan dan penanganan konflik sosial yang terjadi di tingkat daerah. Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum bekerja sama dengan aparat TNI/Polri untuk menjaga stabilitas daerah, mengatasi ketegangan sosial, serta mencegah potensi disintegrasi yang dapat merusak kesatuan bangsa.

3) Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada

Kemendagri juga bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pemilu dan pilkada yang jujur dan adil, guna memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan lancar dan menghasilkan pemimpin yang sah, serta mencegah adanya perselisihan yang dapat merusak persatuan dan integritas NKRI.

b. Kementerian Luar Negeri (Kemlu)

1) Diplomasi Internasional

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) memiliki peran dalam menjaga hubungan internasional Indonesia dengan negara-negara lain. Melalui diplomasi, Kemlu berusaha mengamankan kepentingan nasional Indonesia di dunia internasional, serta mencegah adanya ancaman eksternal yang dapat mempengaruhi kedaulatan NKRI.

2) Keamanan Wilayah Laut dan Perbatasan

Kemlu bekerja sama dengan instansi terkait untuk menjaga keamanan perbatasan dan wilayah laut Indonesia, yang merupakan wilayah strategis negara. Dalam hal ini, Kemlu turut serta dalam negosiasi internasional terkait perbatasan negara, sehingga NKRI tetap utuh dari ancaman klaim wilayah negara lain.

3) Meningkatkan Hubungan dengan Negara Sahabat

Kemlu berperan dalam mempererat hubungan dengan negara sahabat yang berbatasan langsung dengan Indonesia, sehingga tercipta stabilitas regional yang mendukung keamanan dan perdamaian Indonesia.

c. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

1) Pencegahan Radikalisasi dan Terorisme

BNPT berperan penting dalam mencegah radikalisasi dan terorisme yang dapat mengancam keamanan nasional dan kesatuan NKRI. BNPT bekerja sama dengan berbagai lembaga untuk menangani dan mencegah adanya penyebaran paham radikal yang dapat memecah belah bangsa.

2) Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

BNPT juga melaksanakan program-program yang melibatkan masyarakat dalam menjaga perdamaian dan stabilitas sosial. Salah satunya adalah program deradikalisasi yang bertujuan untuk mengurangi pengaruh kelompok teroris dan memperkuat persatuan bangsa.

d. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)

1) Penegakan Hukum dan Keadilan

Kemenkumham memiliki tanggung jawab dalam penegakan hukum melalui lembaga peradilan, serta pengawasan terhadap jalannya pemerintahan agar tidak terjadi pelanggaran konstitusi yang dapat merusak prinsip negara. Kemenkumham juga memiliki kewenangan dalam pembinaan lembaga pemasyarakatan yang berfungsi untuk mencegah terjadinya kejahatan di masyarakat.

2) Pengelolaan Amandemen dan Kebijakan Hukum

Kemenkumham memainkan peran dalam menjaga stabilitas hukum dengan memastikan bahwa setiap amandemen terhadap undang-undang dan peraturan lainnya tidak bertentangan dengan UUD 1945, sehingga keberlanjutan dan keutuhan NKRI tetap terjaga.

e. Badan Informasi Geospasial (BIG)

1) Pemantauan Wilayah Teritorial

BIG berfungsi untuk memantau wilayah teritorial Indonesia, termasuk pengawasan terhadap batas-batas negara dan potensi ancaman dari perubahan alam atau aktivitas manusia yang dapat memengaruhi keutuhan NKRI. Pengelolaan data geospasial yang akurat sangat penting dalam menjaga kedaulatan wilayah Indonesia.

2) Penyediaan Data untuk Keputusan Strategis

BIG menyediakan data geospasial yang digunakan oleh berbagai kementerian/lembaga negara untuk mengambil keputusan strategis yang berkaitan dengan pertahanan, pembangunan, serta pengelolaan sumber daya alam Indonesia.

f. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

1) Melindungi Hak Asasi Manusia

Komnas HAM berperan dalam memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh negara tidak melanggar hak asasi manusia. Dengan melindungi hak asasi manusia, Komnas HAM berkontribusi pada stabilitas sosial dan perdamaian dalam masyarakat, yang sangat penting bagi kelangsungan NKRI.

2) Pengawasan Terhadap Tindakan Pemerintah

Komnas HAM juga berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap tindakan pemerintah dalam penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan, serta untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang yang dapat merusak kepercayaan rakyat terhadap negara dan sistem hukum yang ada.

g. Badan Pengelola Perbatasan Negara (BNPP)

1) Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara

BNPP memiliki tugas untuk mengelola dan mengembangkan wilayah perbatasan negara, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan serta mencegah potensi ancaman yang dapat merusak keutuhan wilayah NKRI. BNPP juga bekerja sama dengan TNI dan Polri untuk memperkuat pengawasan di kawasan perbatasan.

2) Pengembangan Infrastruktur di Daerah Perbatasan

BNPP juga berfokus pada pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan untuk mendukung perekonomian dan mengurangi kesenjangan sosial, yang pada gilirannya memperkuat stabilitas wilayah perbatasan serta menjaga integritas NKRI.

h. Kolaborasi Kementerian/Lembaga dalam Menjaga NKRI

Koordinasi antar kementerian dan lembaga negara sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang efektif dalam menjaga NKRI. Kementerian dan lembaga bekerja sama dalam menangani berbagai tantangan, baik yang bersifat eksternal (ancaman luar negeri) maupun internal (ancaman sosial, politik, dan ekonomi), dengan tujuan utama memperkuat persatuan, integritas, dan keutuhan negara. Sinergi antara berbagai lembaga ini sangat menentukan dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan NKRI dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan.

# BAB 3

BAB 3

## A. Pengertian Semboyan Bhinneka Tunggal Ika

Semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" adalah salah satu pilar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Semboyan ini tertulis pada lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, dan menjadi pengingat bahwa meskipun Indonesia memiliki keberagaman dalam berbagai aspek kehidupan, semua itu dipersatukan oleh identitas nasional yang sama: Indonesia.

Secara etimologis, "Bhinneka Tunggal Ika" berasal dari bahasa Jawa Kuno:

* “Bhinneka” berarti beraneka ragam atau berbeda-beda,
* “Tunggal” berarti satu, dan
* “Ika” berarti itu.

Jadi, secara harfiah semboyan ini dapat diartikan sebagai “Berbeda-beda tetapi tetap satu jua.”

Makna mendalam dari semboyan ini adalah bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan justru menjadi kekuatan dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Keberagaman suku, agama, ras, adat istiadat, dan bahasa daerah bukanlah ancaman, melainkan kekayaan budaya yang harus dihargai dan dijaga bersama.

### B. Asal Usul Historis

Semboyan ini pertama kali diperkenalkan dalam karya sastra berjudul “Kakawin Sutasoma” karya Mpu Tantular, seorang pujangga Kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Dalam salah satu baitnya tertulis: “Bhinneka tunggal ika, tan hana dharma mangrwa.” Artinya: “Berbeda-beda itu satu adanya, tidak ada kebenaran yang mendua.”

Pada masa itu, masyarakat Majapahit terdiri dari berbagai kelompok pemeluk agama Hindu dan Buddha. Mpu Tantular menggunakan ungkapan tersebut untuk menegaskan bahwa perbedaan keyakinan seharusnya tidak menjadi alasan untuk terpecah belah. Ungkapan ini menjadi cerminan toleransi dan harmoni dalam masyarakat yang multikultural.

Kemudian, pada masa pembentukan identitas nasional Indonesia, para pendiri bangsa menjadikan semboyan ini sebagai bagian tak terpisahkan dari lambang negara. Hal ini menunjukkan bahwa nilai persatuan di tengah keberagaman sudah mengakar sejak masa lampau dan tetap relevan hingga kini.

### C. Makna Filosofis dan Nilai-Nilai yang Terkandung

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengandung nilai-nilai luhur yang sangat penting untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di antaranya:

1. Toleransi dan saling menghargai

Kita diajarkan untuk menerima dan menghormati perbedaan, baik dalam hal budaya, agama, maupun pandangan hidup.

1. Persatuan dalam keberagaman

Walaupun masyarakat Indonesia berasal dari latar belakang yang berbeda, mereka tetap dipersatukan oleh semangat kebangsaan.

1. Kesetaraan dan keadilan

Tidak ada kelompok yang lebih tinggi atau rendah; semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama.

1. Solidaritas sosial

Masyarakat Indonesia diajak untuk bekerja sama dan saling tolong-menolong, tanpa memandang suku atau agama.

Nilai-nilai ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi menjadi dasar dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, lingkungan masyarakat, dunia kerja, bahkan dalam penyusunan kebijakan nasional.

### D. Penerapan Bhinneka Tunggal Ika dalam Kehidupan Sehari-Hari

Agar semboyan ini tidak sekadar menjadi kata-kata hiasan pada lambang negara, perlu ada penerapan nyata dalam berbagai aspek kehidupan. Beberapa contoh penerapannya antara lain:

1. Di lingkungan keluarga dan pendidikan

Keluarga dan sekolah merupakan tempat pertama dalam menanamkan nilai-nilai kebhinekaan. Di sini anak-anak diajarkan untuk saling menghargai perbedaan teman, tidak membeda-bedakan berdasarkan suku atau agama, serta belajar hidup dalam kerukunan.

1. Dalam pergaulan masyarakat

Di masyarakat, semboyan ini tampak dalam kegiatan gotong royong, kerja bakti, atau acara-acara adat di mana warga dari berbagai latar belakang bekerja bersama demi kepentingan bersama.

1. Dalam kehidupan beragama

Bhinneka Tunggal Ika mendorong umat beragama untuk hidup rukun, saling menghormati ibadah masing-masing, serta tidak memaksakan keyakinannya kepada orang lain. Indonesia menjamin kebebasan beragama dan perlindungan terhadap semua pemeluk agama.

1. Dalam pemerintahan dan kebijakan publik

Prinsip ini menjadi dasar dalam pembuatan kebijakan yang inklusif dan adil bagi semua warga, tanpa diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Pemerintah juga berupaya menjaga keseimbangan representasi dari berbagai daerah, suku, dan agama.

### E. Tantangan dan Pentingnya Menjaga Nilai Bhinneka Tunggal Ika

Meski menjadi dasar pemersatu bangsa, semangat Bhinneka Tunggal Ika kini menghadapi tantangan besar, khususnya di era digital:

1. Meningkatnya intoleransi dan radikalisme, yang berpotensi menyingkirkan nilai-nilai toleransi.
2. Penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, terutama di media sosial, yang memicu permusuhan antargolongan.
3. Diskriminasi dan ketimpangan sosial, yang bisa menimbulkan rasa ketidakadilan di kalangan masyarakat.

Oleh karena itu, seluruh elemen bangsa, termasuk pelajar, guru, orang tua, pemerintah, dan tokoh masyarakat harus bersinergi untuk menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Hanya dengan menjaga persatuan di tengah keberagamanlah Indonesia dapat menjadi bangsa yang kuat, damai, dan maju.

# BAB 4

BAB 4

## A. Pengertian dan Cara Berita Provokatif Memecah Belah Persatuan

Di era digital saat ini, informasi sangat mudah diakses dan disebarkan oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Namun, tidak semua informasi yang beredar bersifat membangun. Sebagian informasi justru bersifat provokatif, yakni sengaja dibuat untuk memancing emosi, menyulut kebencian, dan memecah belah kesatuan masyarakat.

Berita atau informasi provokatif dapat muncul dalam bentuk artikel, unggahan media sosial, video pendek, atau bahkan komentar di forum publik. Tujuan utamanya adalah membenturkan kelompok masyarakat, menciptakan kecurigaan dan permusuhan antargolongan, serta merusak rasa saling percaya. Misalnya, menyebarkan berita palsu yang menyudutkan satu agama, menyebarkan fitnah terhadap tokoh dari suku tertentu, atau memutarbalikkan fakta sejarah untuk menimbulkan sentimen negatif.

Dalam jangka panjang, paparan informasi provokatif dapat mengikis rasa persatuan dan kesatuan, menciptakan polarisasi sosial, bahkan memicu konflik horizontal. Jika tidak disikapi dengan bijak, masyarakat bisa terpecah belah, dan semangat “Bhinneka Tunggal Ika” akan luntur dari kehidupan sehari-hari.

### B. Ciri-Ciri Informasi atau Berita Provokatif

Agar masyarakat tidak terjebak dalam jebakan informasi provokatif, penting untuk mengenali ciri-cirinya. Beberapa ciri umum dari informasi provokatif antara lain:

1. Judul yang Sensasional dan Provokatif

Judul berita provokatif biasanya dibuat sangat bombastis, emosional, dan mengandung unsur kejut. Tujuannya adalah menarik perhatian dan membangkitkan emosi pembaca. Contoh judul seperti “Agama X Ingin Menguasai Indonesia!” atau “Suku Tertentu Merusak Moral Bangsa” adalah bentuk provokasi yang merusak.

2. Sumber Tidak Jelas atau Anonim

Informasi provokatif sering kali tidak mencantumkan penulis, lembaga, atau media yang

kredibel. Bahkan jika mengutip narasumber, kutipannya tidak dapat diverifikasi. Hal ini menyulitkan pembaca untuk memeriksa keabsahan informasi.

3. Isi Penuh Emosi Negatif

Biasanya, isi berita provokatif mengandung kemarahan, kebencian, dan prasangka buruk terhadap kelompok tertentu. Bahasa yang digunakan juga cenderung kasar, menyudutkan, dan tidak objektif.

4. Data Tidak Valid atau Tidak Disertai Bukti

Informasi provokatif sering kali menyampaikan klaim besar tanpa disertai bukti nyata, grafik data, atau kutipan resmi. Ini membuatnya rawan menjadi hoaks.

5. Menyebarkan Ujaran Kebencian dan Intoleransi

Isinya bisa mengandung penghinaan terhadap agama, ras, atau etnis tertentu. Hal ini secara langsung melanggar prinsip toleransi dan keberagaman.

### C. Sikap Kritis yang Harus Dimiliki Masyarakat

Dalam menghadapi gempuran informasi, terutama yang bersifat provokatif, masyarakat harus memiliki sikap kritis. Beberapa langkah penting dalam bersikap kritis terhadap informasi adalah:

1. Memverifikasi Kebenaran Informasi

Jangan langsung percaya dengan informasi yang diterima. Cek kembali kebenarannya melalui sumber resmi atau media kredibel. Gunakan situs cek fakta seperti TurnBackHoax atau CekFakta.com.

1. Membandingkan dengan Sumber Lain

Jika suatu berita hanya muncul di satu media tidak terkenal, kemungkinan besar itu tidak benar. Bandingkan dengan berita dari media arus utama yang sudah terbukti kredibel.

1. Tidak Mudah Terpancing Emosi

Jangan langsung marah, takut, atau membenci setelah membaca informasi tertentu. Ambil waktu untuk menilai secara rasional.

1. Memperhatikan Gaya Bahasa dan Struktur

Informasi yang baik akan disampaikan dengan bahasa yang santun, logis, dan berimbang. Sedangkan berita provokatif cenderung emosional, sepihak, dan menyudutkan pihak tertentu.

### D. Upaya Menangkal dan Mencegah Dampak Informasi Provokatif

Menjaga persatuan di tengah keberagaman adalah tanggung jawab bersama. Berikut adalah beberapa upaya untuk menangkal penyebaran informasi provokatif:

1. Peningkatan Literasi Digital

Literasi digital harus ditanamkan sejak dini, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Anak-anak dan remaja perlu diajarkan cara menggunakan media sosial dengan bijak, mengenali hoaks, dan menghindari penyebaran ujaran kebencian.

1. Memperkuat Pendidikan Pancasila dan Kebhinekaan

Pendidikan karakter yang mengajarkan nilai-nilai toleransi, keadilan, dan persatuan harus terus dikembangkan. Pelajaran PPKn, sejarah, dan agama bisa dijadikan sarana untuk membangun sikap menghargai perbedaan.

1. Menggunakan Media Sosial secara Bijak

Masyarakat perlu diajak untuk menjadi pengguna aktif sekaligus bertanggung jawab di media sosial. Jangan mudah membagikan informasi yang belum jelas kebenarannya. Gunakan fitur pelaporan jika menemukan konten provokatif.

1. Peran Keluarga dan Tokoh Masyarakat

Orang tua, guru, dan tokoh agama berperan penting dalam membentuk opini dan sikap anak muda. Mereka bisa menjadi contoh teladan dalam menjaga persatuan dan menolak berita-berita yang menyesatkan.

1. Penegakan Hukum terhadap Penyebar Hoaks dan Provokator

Pemerintah melalui aparat berwenang harus menindak tegas penyebar hoaks, ujaran kebencian, dan konten provokatif. Hal ini penting agar ada efek jera dan suasana damai tetap terjaga.